

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

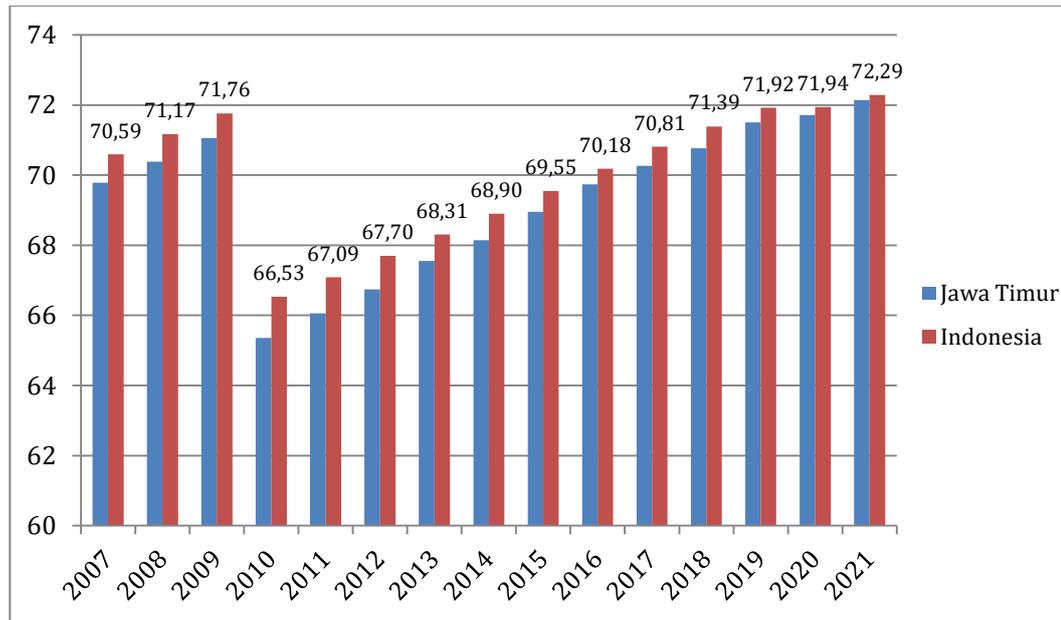
### **1.1. Latar Belakang**

*United Nation Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 menyatakan bahwa pembangunan negara tidak hanya sebatas peningkatan terhadap pendapatan dan kekayaan semata, namun juga peningkatan taraf hidup masyarakat. Adanya pembangunan manusia merupakan sebuah upaya untuk mengalihkan fokus kebijakan dan program yang menitikberatkan pada perluasan output pada sistem produksi ekonomi dan penciptaan kekayaan menjadi peningkatan pemanfaatan sumber daya manusia yang lebih lanjut akan memberikan sebuah pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perluasan output, sistem produksi ekonomi dan penciptaan kekayaan bukanlah menjadi satu-satunya tujuan akhir dalam dan menjadi sebuah tolak ukur kesuksesan dalam suatu negara.

Paradigma pembangunan yang marak berkembang di berbagai negara saat ini dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi salah satunya adalah dengan menggunakan kualitas dari sumber daya manusia sebagai tolak ukur (Setiawan & Budiana, 2015). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah parameter yang digunakan untuk memantau perkembangan perubahan kualitas sumber daya manusia. Manusia ialah sumber kekayaan mutlak dan riil dalam bermasyarakat (Chaurasia, 2019). Terdapat 3 aspek yang digunakan dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia antara lain melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup

layak (BPS Kabupaten Humbang Hasundutan, 2018). Berdasarkan pada Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia terbagi dalam data dengan skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

**Gambar 1.1**  
**IPM Indonesia dan Jawa Timur**



Sumber : BPS Jatim, 2023

Badan Pusat Statistik atau BPS telah mempublikasikan data yang kemudian diakumulasikan dan dipaparkan dalam gambar 1.1 diatas. Gambar diatas menunjukkan pergerakan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur selama 15 tahun memiliki kecenderungan tren yang semakin meningkat secara konstan. Dapat dilihat pada grafik diatas bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2007-2021 mengalami tren cenderung naik dengan nilai sebesar 69,78% pada tahun 2007 dan sebesar 72,14% pada tahun 2021. Kenaikan tertinggi nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 0,81% yang terjadi pada tahun 2012-2013 dan 2014-2015.

Terdapat beberapa kategori capaian dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah ditetapkan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) (Cahya, 2021) antara lain :

Sangat tinggi  $IPM > 80$

Tinggi  $70 < IPM < 80$

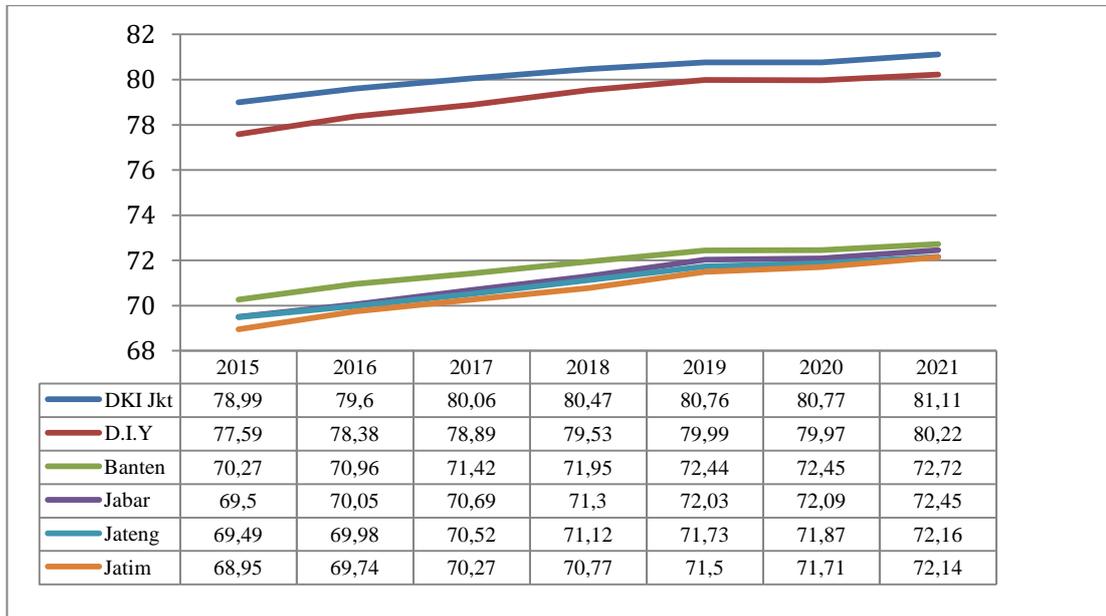
Sedang  $60 < IPM < 70$

Rendah  $IPM < 60$

Sehingga berdasarkan pada kategori yang telah ditetapkan oleh UNDP diatas, Provinsi Jawa Timur dapat dikelompokkan dan masuk kedalam kategori sedang dan tinggi. Pada tahun 2007, 2010-2016 capaian nilai Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur menempati kelompok kategori sedang, sedangkan pada tahun 2008-2009, 2017-2021 termasuk kedalam kategori tinggi.

Kenaikan yang terjadi secara konstan yang dialami oleh Provinsi Jawa Timur mengindikasikan bahwa bermacam upaya telah digalakkan oleh pemerintah daerah sedikit demi sedikit dengan memberikan perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun meskipun kecenderungan capaian nilai IPM Provinsi Jawa Timur adalah meningkat, capaian nilai tersebut masih belum bisa berada diatas nilai IPM nasional dan beberapa provinsi lainnya di Pulau Jawa.

**Tabel 1.1**  
**IPM 5 Provinsi di Pulau Jawa**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

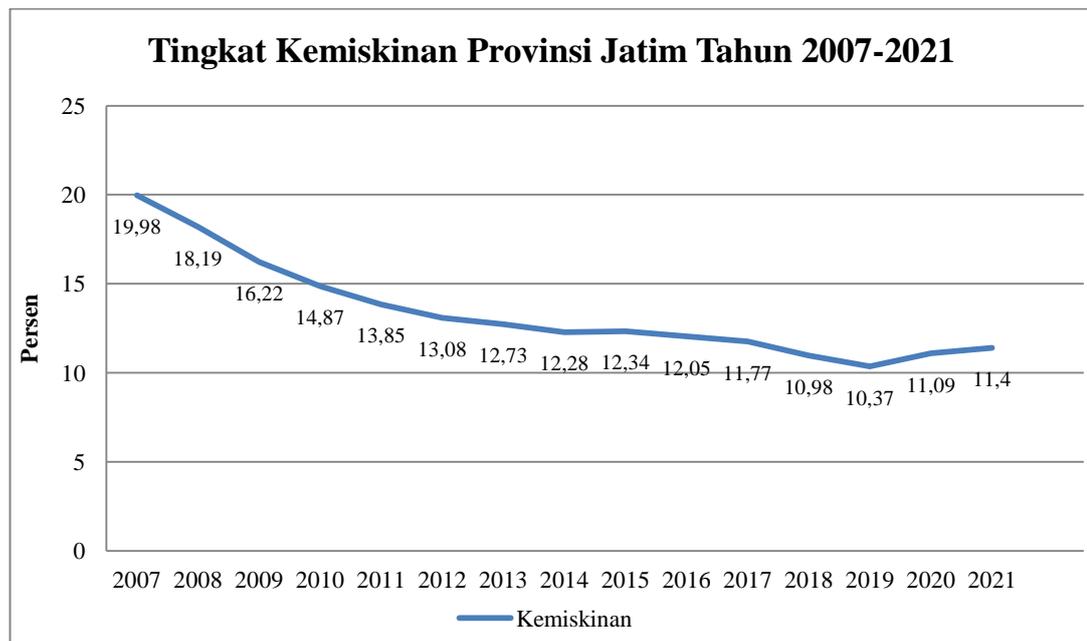
Pada tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwasannya dalam 7 tahun terakhir sejak tahun 2015 hingga tahun 2021 Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Pulau Jawa. Kemudian pada urutan selanjutnya dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi secara runtut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y), Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. DKI Jakarta dengan nilai sebesar 81,11% pada tahun 2021 menjadikannya sebagai provinsi dengan capaian nilai IPM paling tinggi, sedangkan capaian nilai terendah diantara 6 provinsi di Pulau Jawa adalah Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 72,14% pada tahun 2021. Dalam 15 tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur konsisten menduduki posisi terakhir dibandingkan dengan keenam provinsi lainnya di Pulau Jawa.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan capaian nilai Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) di Provinsi Jawa Timur. Hal ini terbukti melalui kecenderungan capaian nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur dengan konsisten bergerak menunjukkan adanya kenaikan. Dalam menggambarkan peningkatan nilai kesejahteraan masyarakat yang merupakan satu dari beberapa indikator untuk terus mendorong dan mencapai keberhasilan pembangunan, maka pola konsumsi menjadi salah satu indikator yang diperhatikan (Darsana, 2019). Pola konsumsi masyarakat yang tinggi dapat mencerminkan bahwa masyarakat mampu mendapatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan konsumsi yang memadai.

Seorang ataupun sekumpulan orang yang memiliki kondisi tidak sanggup memenuhi kebutuhan ekonomi dalam standar minimal kebutuhan hidup tertentu mengakibatkan munculnya kemiskinan di suatu daerah (Firdaus, 2020). Salah satu permasalahan yang cukup biasa dihadapi dan dijumpai pada negara diseluruh belahan dunia adalah kemiskinan, tak terkecuali adalah di negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dapat menjadi hambatan dalam upaya peningkatan kualitas manusia. Hal ini dikarenakan kemiskinan akan membuat seseorang menjadi terbatas dan terhambat dalam mendapatkan kebutuhan hidup mereka, seperti mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak, mendapatkan hak untuk mengenyam jenjang pendidikan yang layak, dan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya (Aditya et al., 2021).

**Gambar 1.2 Tingkat Kemiskinan Provinsi Jatim**

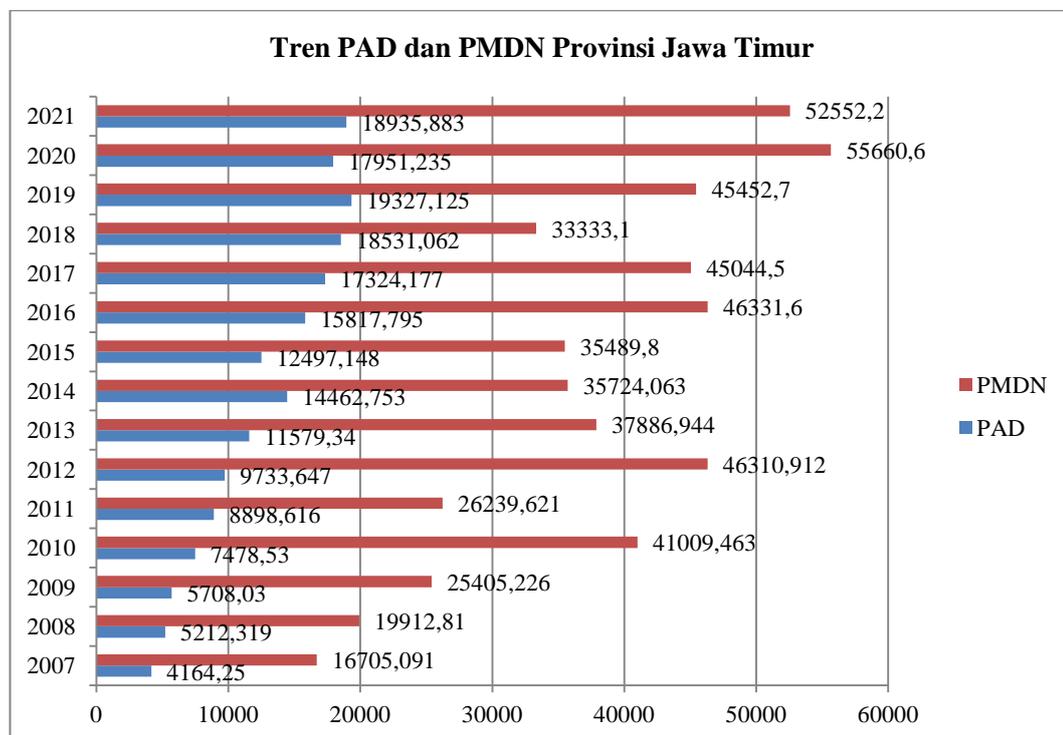


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2021

Pada gambar 1.2 diatas, dapat dilihat bahwasannya dari tahun ke tahun, terhitung sejak tahun 2007-2021, tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2007 tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 19,98%. Selanjutnya pada tahun 2008 terjadi penurunan sebanyak 1,79% menjadi 18,19%. Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur yang terus mengalami perbaikan dengan turunnya tren yang terbentuk terjadi pada 2008-2009 sebanyak 1,97% sedangkan pada tahun 2019-2020 terjadi peningkatan presentase tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 0,72%. Peningkatan presentase ini merupakan akibat dari adanya pandemi global COVID-19 yang kemudian menghambat mobilitas penduduk dalam rangka mengurangi persebaran rantai penyebaran pandemi, mengakibatkan tidak maksimalnya pergerakan perekonomian. Terhambatnya pergerakan perekonomian ini menyebabkan perputaran uang di masyarakat juga terganggu. Para pengusaha pada akhirnya terpaksa harus mengurangi cost

yang dikeluarkan agar mampu bertahan. Pengurangan jumlah tenaga kerja menjadi salah satu pilihan yang banyak dipilih para pengusaha untuk meminimalkan pengeluarannya. Hal inilah yang menyebabkan presentase tingkat kemiskinan pada Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2020 mengalami peningkatan. Banyaknya penduduk yang kehilangan pekerjaan membuat mereka kesulitan untuk terus memenuhi kebutuhan hidupnya.

**Gambar 1.3 Pertumbuhan PAD dan PMDN Provinsi Jawa Timur**



Sumber : BPS Jawa Timur, 2023

Sesuai dengan penggambaran yang tertera pada grafik diatas, dalam rentang waktu 15 tahun terakhir, dapat diamati dan dikatakan bahwasannya pergerakan yang dibentuk oleh PAD pada Provinsi Jawa Timur menunjukkan sebuah peningkatan. Sepanjang tahun 2007-2014, Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2008 diindikasikan terjadi pergerakan yang positif atau sebuah peningkatan penerimaan pendapatan sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Peningkatan

penerimaan PAD provinsi Jawa Timur paling tinggi sepanjang tahun 2007 sampai 2014 adalah pada tahun 2014. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 28% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2013. Di tahun 2013, penerimaan pendapatan yang diperoleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 11.579,34 milyar kemudian pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi Rp 14.462,75 milyar. Peningkatan yang terjadi sepanjang 2007 hingga 2014 mengindikasikan perkembangan perekonomian di wilayah Provinsi Jawa Timur semakin baik. Selanjutnya pada tahun 2015 hingga 2021 penerimaan PAD pemerintah Provinsi Jawa Timur cukup fluktuatif. Tahun 2015, terjadi penurunan penerimaan PAD sebesar -19,66%. Penurunan ini merupakan penurunan tertinggi sepanjang tahun 2007-2021. Penurunan yang cukup tinggi ini disebabkan terjadinya pelemahan ekonomi dalam skala nasional yang saat itu tengah terjadi sehingga hal itu pun berpengaruh pada Pendapatan Daerah secara keseluruhan. Penerimaan tertinggi diperoleh pada tahun 2016, dimana terjadi peningkatan sebesar 33% dari tahun sebelumnya.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan merupakan salah satu bagian cukup krusial dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mampu menekan angka kemiskinan. Adanya peran pemerintah dalam pengalokasian Pendapatan Asli Daerah dan juga investasi atau Penanaman Modal Dalam Negeri akan mengurangi kemiskinan dan mendorong perbaikan kualitas sumber daya manusia dan secara tidak langsung akan juga memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah :

1. Apakah ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah ada pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
3. Apakah ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah melalui Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah ada pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian ini, maka terbentuklah maksud/tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur.
2. Mengetahui pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah melalui Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur.

4. Mengetahui pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur.

#### **1.4. Ruang Lingkup**

1. Penelitian mencakup data kurun waktu (*time series*) pada Provinsi Jawa Timur selama jangka waktu 15 tahun dengan periode tahun 2007 sampai tahun 2021.
2. Dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas yaitu variable Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 1 variabel terikat yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan 1 variabel intervening yaitu Tingkat Kemiskinan.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan nantinya dapat memberikan informasi dan manfaat lainnya kepada pemerintah daerah dan pihak-pihak lainnya yang terkait dalam hal pemecahan masalah dan perumusan kebijakan di wilayah Provinsi Jawa Timur. Khususnya untuk permasalahan yang terkait dengan variable-variabel penelitian ini antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga capaian nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur dapat mengalami peningkatan dan lebih merata.